



**RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
(B K D)
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2011 - 2016**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
(B K D)
PANYABUNGAN
2012**

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era globalisasi membuka peluang persaingan bebas dalam aspek kehidupan termasuk sektor layanan masyarakat baik dilingkungan Pemerintah maupun swasta dalam lingkungan regional, domestik/ nasional maupun internasional. Antisipasi terhadap tuntutan globalisasi hendaknya dilakukan oleh semua pihak melalui pembenahan-pembenahan disemua sektor.

Pembenahan tersebut hendaknya dilakukan secara simultan disegala bidang secara berkesinambungan dan terintegrasi satu sama lain. Pembenahan dibidang pemerintahan dan pembangunan dimotori dengan kebijakan desentralisasi yang dilandasi pergeseran konsentrasi kegiatan dari pusat ke daerah khususnya kabupaten/kota. maka konsekwensi *logis* tuntutan layanan masyarakat khususnya di daerah akan semakin meningkat tajam dalam kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis.

Keberhasilan suatu instansi pemerintah selama ini lebih ditekankan kepada kemampuan instansi menyerap atau menghabiskan jumlah dana anggaran yang telah disediakan melalui pengukuran lainnya. Seharusnya keberhasilan pemerintah akan dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumberdaya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis.

B A B III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Pelayanan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai, Sistem Prosedur, Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3.1.1 Potensi SDM BKD

a. Berdasarkan Golongan/ Ruang

No.	Golongan/Ruang	Jumlah	Jenis kelamin	
			L	P
1	I	-	-	-
2	II	9	5	4
3	III	24	20	4
4	IV	4	4	-
Jumlah		37	29	8

b. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No.	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis kelamin	
			L	P
1	Pim Tk I	-	-	-
2	Pim Tk.II	-	-	-
3	Pim. III	3	3	-
4	Pim IV	3	2	1
Jumlah		6	5	1

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Laki-laki	Perempuan	JUMLAH
1	29	8	37

maupun Analisa Standar Belanja (ASB), yang keseluruhannya merupakan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja.

- 3). Merancang dan membangun Sistem Pengukuran Kinerja yang sistematis dan mempertimbangkan ketersediaan data serta pengorganisasian data kinerjanya.

Sangat dimungkinkan banyaknya kekurangan-kekurangan dalam penetapan Rencana Strategis ini, namun diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diperoleh saran-saran perbaikan yang dapat menambah kesempurnaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016.

Panyabungan, Januari 2012

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs. H. IMRAN NASUTION, MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 19550612 198503 1 004